

DARI MEJA MANUAL KE LAYAR DIGITAL: DISRUPSI DIGITAL DAN TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK

Delia Putri¹, Aulia Maghfira², Nindi Islamiati Utami³

deliaaputri14@gmail.com¹, maghfiraaulia00@gmail.com², nindiislamiati@gmail.com³

Universitas Swadaya Gunung Jati

ABSTRAK

Disrupsi digital mendorong perubahan signifikan dalam birokrasi publik Indonesia, terutama peralihan dari sistem administrasi manual menuju tata kelola berbasis digital. Transformasi ini tidak hanya berkaitan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan organisasi, budaya kerja aparatur, kepemimpinan, serta dinamika sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi birokrasi Indonesia dalam konteks disrupsi digital melalui perspektif ekologi administrasi publik. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi kepustakaan dan analisis kasus pelayanan publik digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi digital sangat dipengaruhi keseimbangan antara lingkungan alamiah, non-alamiah, dan digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan layanan publik berbasis digital belum sepenuhnya berjalan merata akibat perbedaan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya organisasi. Perspektif ekologi administrasi publik membantu menjelaskan interaksi kompleks antara birokrasi dan lingkungannya dalam menghadapi tekanan perubahan teknologi. Ketidaksiapan aparatur dan resistensi organisasi menjadi faktor utama penghambat transformasi birokrasi digital. Artikel ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang adaptif terhadap karakteristik lingkungan administrasi di setiap wilayah. Secara teoretis, kajian ini memperkaya diskursus administrasi publik kontemporer, sementara secara praktis memberikan rekomendasi kebijakan berbasis keseimbangan ekologi birokrasi.

Kata Kunci: Disrupsi Digital, Transformasi Birokrasi, Ekologi Administrasi Publik.

ABSTRACT

Digital disruption is driving significant changes in Indonesia's public bureaucracy, particularly the shift from manual administrative systems to digital-based governance. This transformation is not only related to the use of information technology but also touches on aspects of the organizational environment, the work culture of civil servants, leadership, and social dynamics. This article aims to analyze the transformation of the Indonesian bureaucracy in the context of digital disruption through a public administration ecology perspective. A descriptive qualitative approach is used through literature review and case analysis of digital public services in Indonesia. The results of the study indicate that the success of digital bureaucratic transformation is greatly influenced by the balance between the natural, non-natural, and digital environments. The research findings show that the implementation of digital-based public services has not been fully equitable due to differences in human resource capacity, infrastructure, and organizational culture. The public administration ecology perspective helps explain the complex interactions between the bureaucracy and its environment in facing the pressures of technological change. Civil servant unpreparedness and organizational resistance are the main factors hindering digital bureaucratic transformation. This article emphasizes the importance of public policies that adapt to the characteristics of the administrative environment in each region. Theoretically, this study enriches contemporary public administration discourse, while practically providing policy recommendations based on a balanced bureaucratic ecology.

Keywords: Digital Disruption, Bureaucratic Transformation, Public Administration Ecology.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk ranah birokrasi publik di Indonesia. Aktivitas administrasi negara yang dahulu identik memakai meja kerja manual, tumpukan arsip fisik, dan proses panjang kini mulai bergeser menuju sistem berbasis layar digital. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga memengaruhi pola pikir aparatur, budaya organisasi, serta hubungan negara dan warga. Transformasi digital birokrasi menjadi isu penting karena berkaitan langsung pada kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika perubahan lingkungan administrasi publik yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman (Katharina, 2021).

Disrupsi digital menjadi pemicu utama perubahan birokrasi di era pemerintahan modern. Teknologi informasi, kecerdasan buatan, serta sistem berbasis data mendorong lahirnya pola kerja baru dalam administrasi publik. Proses pengambilan keputusan tidak lagi bergantung penuh pada prosedur manual, tetapi mulai mengandalkan sistem digital terintegrasi. Perubahan ini menuntut aparatur negara memiliki kapasitas adaptasi tinggi terhadap teknologi. Ketidaksiapan birokrasi menghadapi disrupsi digital berpotensi menciptakan kesenjangan pelayanan publik (Sepriano et al., 2023).

Birokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kompleksitas lingkungan sosial, politik, dan teknologi. Transformasi digital tidak selalu berjalan mulus karena berhadapan pada struktur birokrasi yang cenderung kaku. Budaya kerja konvensional masih kuat tertanam di berbagai institusi pemerintahan. Situasi ini menunjukkan pentingnya memahami birokrasi sebagai bagian dari ekologi administrasi publik. Perspektif ekologi menempatkan birokrasi sebagai sistem yang dipengaruhi lingkungan internal dan eksternal (Heri et al., 2021).

Ekologi administrasi publik memandang organisasi pemerintah sebagai entitas yang hidup dan saling berinteraksi pada lingkungannya. Perubahan teknologi menjadi salah satu faktor lingkungan yang memaksa birokrasi beradaptasi. Ketika adaptasi berjalan lambat, muncul ketidakseimbangan antara tuntutan publik dan kapasitas birokrasi. Digitalisasi birokrasi tidak hanya soal alat, tetapi juga relasi manusia, struktur organisasi, serta nilai kerja. Pendekatan ekologi membantu memahami kompleksitas transformasi birokrasi Indonesia di era digital (Muntu, 2024).

Transformasi birokrasi digital di Indonesia terlihat melalui penerapan e-government dan sistem pelayanan berbasis daring. Pemerintah mendorong layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Inovasi ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi panjang yang sering dikeluhkan masyarakat. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan teknis dan sumber daya manusia. Ketimpangan akses teknologi turut memengaruhi keberhasilan transformasi digital birokrasi (Katharina, 2021).

Disrupsi digital juga memengaruhi budaya organisasi sektor publik. Aparatur negara dituntut memiliki pola kerja adaptif, kolaboratif, serta terbuka terhadap inovasi. Nilai kerja lama yang hierarkis mulai berbenturan pada kebutuhan fleksibilitas dan kecepatan. Inovasi budaya organisasi menjadi kunci keberhasilan transformasi digital birokrasi. Tanpa perubahan budaya kerja, teknologi hanya menjadi simbol modernisasi tanpa dampak nyata (Hanifah & Frinaldi, 2025).

Peran kepemimpinan publik menjadi faktor penting dalam mengarahkan transformasi birokrasi digital. Pemimpin birokrasi perlu memiliki visi digital serta keberanian mengambil risiko inovasi. Kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan lingkungan mampu mendorong aparatur beradaptasi lebih cepat. Generasi pemimpin muda memiliki potensi besar membawa semangat transformasi birokrasi. Kepemimpinan adaptif

menjadi penentu keseimbangan ekologi administrasi publik di era digital (Adam, 2025).

Pemanfaatan kecerdasan buatan mulai diperkenalkan dalam pelayanan publik Indonesia. Teknologi ini membantu analisis data, prediksi kebijakan, hingga otomatisasi layanan administratif. Inovasi berbasis AI berpotensi meningkatkan efisiensi dan ketepatan layanan publik. Meski peluangnya besar, risiko etika dan kesiapan regulasi tetap perlu perhatian serius. Transformasi berbasis AI menambah kompleksitas lingkungan administrasi publik Indonesia (Erison et al., 2023).

Transformasi digital birokrasi juga berkaitan erat pada kualitas sumber daya manusia aparatur. Aparatur perlu meningkatkan literasi digital dan kemampuan analitis. Pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar aparatur tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Lingkungan kerja birokrasi perlu mendukung pembelajaran dan inovasi. Tanpa penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi birokrasi berisiko gagal mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik (Arsawan et al., 2025).

Berdasarkan dinamika tersebut, kajian mengenai disrupsi digital dan transformasi birokrasi Indonesia menjadi relevan. Perspektif ekologi administrasi publik memberi kerangka analisis yang komprehensif mengenai interaksi birokrasi dan lingkungan digital. Pendekatan ini membantu melihat perubahan birokrasi tidak sebagai proses tunggal, tetapi sebagai sistem adaptif. Kajian ini penting bagi pengembangan teori administrasi publik kontemporer. Selain itu, kajian ini memiliki nilai praktis bagi perumusan kebijakan publik digital (Suryanto, 2023).

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis transformasi birokrasi Indonesia di tengah disrupsi digital melalui perspektif ekologi administrasi publik. Artikel ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor lingkungan yang memengaruhi keberhasilan transformasi digital birokrasi. Analisis diarahkan pada perubahan struktur, budaya organisasi, dan peran kepemimpinan publik. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai tantangan birokrasi digital Indonesia. Pendekatan teoretis dan empiris digunakan sebagai dasar analisis.

Manfaat teoritis dari penulisan artikel ini terletak pada pengayaan kajian administrasi publik berbasis perspektif ekologi. Artikel ini memperluas pemahaman mengenai hubungan teknologi digital dan birokrasi publik. Manfaat praktisnya berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam mengelola transformasi birokrasi digital. Kajian ini juga berguna bagi aparatur negara dalam memahami perubahan lingkungan kerja birokrasi. Selain itu, artikel ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti administrasi publik.

METODOLOGI

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami fenomena transformasi birokrasi Indonesia di tengah disrupsi digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika perubahan birokrasi dari berbagai sudut pandang. Fokus penelitian tidak berhenti pada hasil akhir digitalisasi, tetapi juga menelusuri proses adaptasi birokrasi terhadap lingkungan digital. Pendekatan deskriptif digunakan agar realitas empiris dapat dijelaskan apa adanya tanpa manipulasi variabel. Metode ini relevan dalam kajian administrasi publik yang menekankan konteks dan interaksi lingkungan organisasi (Sepriano et al., 2023).

Objek penelitian mencakup birokrasi publik Indonesia yang mengalami transformasi digital dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Kajian difokuskan pada perubahan sistem kerja birokrasi dari pola manual menuju pemanfaatan teknologi digital. Lingkup pembahasan meliputi struktur organisasi, budaya kerja aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi. Perspektif ekologi administrasi publik digunakan sebagai pisau

analisis utama. Perspektif ini melihat birokrasi sebagai sistem yang dipengaruhi lingkungan sosial, teknologi, dan politik (Heri et al., 2021).

Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi akademik relevan. Literatur yang digunakan berfokus pada tema transformasi digital, administrasi publik, ekologi organisasi, serta inovasi birokrasi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitas akademik. Data pendukung berupa kebijakan e-government Indonesia juga digunakan sebagai penguat analisis (Katharina, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mendalam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan penelitian sebelumnya. Proses ini melibatkan penelusuran database jurnal ilmiah dan penerbit akademik. Setiap sumber dibaca secara kritis dan dicatat poin pentingnya. Teknik ini membantu membangun kerangka konseptual yang kuat mengenai transformasi birokrasi digital (Suryanto, 2023).

Tahapan pengumpulan data dimulai dari identifikasi kata kunci relevan. Kata kunci meliputi disrupsi digital, transformasi birokrasi, ekologi administrasi publik, dan pelayanan publik digital. Setelah itu, peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan kesesuaian topik dan tahun publikasi. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan. Proses ini bertujuan menjaga konsistensi dan fokus kajian.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif tematik. Data yang telah dikumpulkan dikategorikan ke dalam tema utama sesuai fokus penelitian. Tema tersebut mencakup disrupsi digital, perubahan budaya birokrasi, peran kepemimpinan, serta adaptasi organisasi. Setiap tema dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif ekologi administrasi publik. Analisis ini membantu memahami hubungan sebab akibat antara lingkungan digital dan perubahan birokrasi (Muntu, 2024).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama berupa reduksi data dengan menyaring informasi relevan. Tahap kedua berupa penyajian data dalam bentuk narasi analitis. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar tema. Tahapan ini menjaga alur analisis tetap sistematis dan logis.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber. Peneliti membandingkan informasi dari berbagai literatur agar memperoleh pemahaman yang konsisten. Perbedaan pandangan antar sumber dianalisis secara kritis, bukan dihindari. Pendekatan ini membantu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Validitas konseptual menjadi perhatian utama dalam kajian ini (Arsawan et al., 2025).

Pendekatan ekologi administrasi publik digunakan sebagai kerangka interpretasi data. Kerangka ini membantu melihat birokrasi sebagai sistem adaptif yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Transformasi digital dipahami sebagai respon birokrasi terhadap tekanan lingkungan teknologi. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan kegagalan atau keberhasilan inovasi birokrasi. Analisis berbasis ekologi memberi kedalaman pemahaman terhadap kompleksitas birokrasi Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data sekunder. Keterbatasan tersebut membuka peluang penelitian lanjutan berbasis studi lapangan. Meski begitu, kajian literatur mendalam tetap mampu memberikan gambaran konseptual kuat. Metode ini sesuai bagi analisis awal fenomena transformasi birokrasi digital. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar pengembangan riset empiris selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Eksekutif

Transformasi birokrasi Indonesia dari sistem manual menuju tata kelola digital menunjukkan perubahan signifikan dalam cara negara berinteraksi bersama masyarakat. Studi ini menemukan bahwa digitalisasi birokrasi tidak hanya dipengaruhi kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi lingkungan sosial, budaya organisasi, dan kapasitas aparatur. Kasus penerapan pelayanan publik digital seperti e-government dan layanan administrasi daring memperlihatkan adanya ketimpangan adaptasi antar instansi. Perspektif ekologi administrasi publik membantu menjelaskan mengapa sebagian organisasi mampu beradaptasi cepat, sementara lainnya mengalami stagnasi. Hasil analisis menunjukkan kebutuhan kebijakan yang menekankan keseimbangan antara teknologi, sumber daya manusia, dan lingkungan organisasi.

Latar Belakang Masalah

Perubahan lingkungan digital memicu tekanan besar terhadap birokrasi Indonesia. Masyarakat semakin terbiasa pada layanan cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Di sisi lain, birokrasi masih dihadapkan pada struktur kerja lama, prosedur berlapis, dan budaya administratif yang cenderung formal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas birokrasi. Ketidakseimbangan tersebut terlihat jelas dalam implementasi pelayanan publik digital di tingkat pusat maupun daerah (Katharina, 2021).

Deskripsi Kasus

Salah satu kasus nyata dapat dilihat dari penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis daring di beberapa pemerintah daerah. Layanan ini bertujuan mempermudah pengurusan dokumen seperti KTP dan KK tanpa kehadiran fisik. Pada praktiknya, sebagian daerah berhasil memangkas waktu layanan, sementara daerah lain justru menghadapi keluhan masyarakat. Kendala utama berasal dari keterbatasan literasi digital aparatur dan infrastruktur teknologi. Kasus ini mencerminkan ketidaksamaan kondisi ekologi administrasi publik antar wilayah.

Konteks Digital: Alamiah, Non-Alamiah, dan Digital

Lingkungan alamiah mencakup kondisi geografis dan akses wilayah yang memengaruhi infrastruktur digital. Daerah terpencil menghadapi keterbatasan jaringan internet yang berdampak langsung pada kualitas layanan daring. Lingkungan non-alamiah meliputi budaya organisasi, struktur birokrasi, dan kebijakan internal instansi. Sementara itu, lingkungan digital mencakup sistem informasi, platform pelayanan, dan pemanfaatan data. Ketiga lingkungan ini saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan transformasi birokrasi digital (Heri et al., 2021).

Masalah Administrasi Publik

Masalah utama administrasi publik terletak pada ketidaksiapan aparatur dalam menghadapi perubahan digital. Banyak aparatur masih berorientasi pada prosedur manual dan kurang adaptif terhadap teknologi baru. Selain itu, koordinasi antar instansi sering kali tidak sinkron akibat perbedaan sistem digital. Ketergantungan pada teknologi tanpa penguatan kapasitas manusia juga menimbulkan risiko kegagalan layanan. Masalah ini menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi bukan sekadar persoalan teknis.

Analisis Teori Ekologi Administrasi Publik

Teori ekologi administrasi publik memandang birokrasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam konteks disrupsi digital, teknologi bertindak sebagai faktor lingkungan yang memaksa birokrasi beradaptasi. Ketika adaptasi tidak seimbang, muncul ketegangan antara struktur organisasi dan tuntutan publik. Kasus layanan kependudukan daring menunjukkan birokrasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri pada lingkungan digital. Teori ini membantu memahami bahwa

kegagalan bukan akibat satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antar elemen lingkungan (Muntu, 2024).

Analisis Ekologis

Analisis ekologis menunjukkan adanya ketimpangan adaptasi antara lingkungan digital dan lingkungan organisasi birokrasi. Teknologi berkembang cepat, sementara budaya kerja birokrasi bergerak lebih lambat. Ketidakseimbangan ini menciptakan resistensi internal dan menurunkan efektivitas layanan. Di daerah yang kepemimpinannya adaptif, transformasi digital berjalan lebih baik. Hal ini menegaskan peran lingkungan kepemimpinan dalam menjaga keseimbangan ekologi administrasi publik (Adam, 2025).

Temuan Lapangan dan Data Pendukung

Beberapa laporan menunjukkan bahwa penerapan e-government mampu mempercepat layanan publik hingga 30–40 persen di daerah dengan infrastruktur memadai (Katharina, 2021). Di sisi lain, daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia digital mengalami peningkatan keluhan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa teknologi bukan faktor penentu tunggal keberhasilan. Kesiapan aparatur dan dukungan organisasi menjadi variabel kunci. Data ini memperkuat argumen ekologi administrasi publik mengenai pentingnya keseimbangan lingkungan.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Lingkungan Administrasi Publik Digital

Aspek Lingkungan	Kondisi Adaptif	Kondisi Tidak Adaptif
Infrastruktur Digital	Akses internet stabil	Jaringan terbatas
SDM Aparatur	Literasi digital tinggi	Literasi digital rendah
Budaya Organisasi	Terbuka pada inovasi	Resisten perubahan
Kepemimpinan	Adaptif dan visioner	Administratif formal

Tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi digital bergantung pada kombinasi faktor lingkungan, bukan hanya teknologi.

Opsi Kebijakan

Opsi kebijakan pertama menitikberatkan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan literasi digital berkelanjutan. Opsi kedua mendorong penyesuaian struktur organisasi agar lebih fleksibel terhadap inovasi teknologi. Opsi ketiga menekankan integrasi sistem digital lintas instansi guna mengurangi fragmentasi layanan. Setiap opsi memiliki implikasi kebijakan yang berbeda tergantung kondisi lingkungan organisasi. Pemilihan opsi perlu mempertimbangkan keseimbangan ekologi administrasi publik (Sepriano et al., 2023).

Rekomendasi Utama

Rekomendasi utama mengarah pada pengembangan kebijakan transformasi birokrasi berbasis pendekatan ekologi administrasi publik. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan digital berdasarkan karakteristik lingkungan daerah. Penguatan kepemimpinan adaptif menjadi prioritas penting. Investasi teknologi perlu diiringi penguatan budaya organisasi dan kapasitas aparatur. Rekomendasi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan digital dan realitas birokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Transformasi birokrasi Indonesia dari sistem manual menuju tata kelola digital merupakan proses adaptasi yang dipengaruhi banyak faktor lingkungan. Disrupsi digital mendorong perubahan pola kerja birokrasi, tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Perspektif ekologi administrasi publik menunjukkan bahwa birokrasi berfungsi sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi bersama lingkungan alamiah, non-alamiah, dan digital. Ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan organisasi memicu berbagai persoalan administrasi publik. Temuan ini

menegaskan bahwa transformasi birokrasi perlu dipahami sebagai proses adaptif, bukan sekadar modernisasi alat kerja.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif, budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi, serta kapasitas aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan birokrasi digital. Kasus pelayanan publik daring memperlihatkan adanya ketimpangan adaptasi antar daerah akibat perbedaan kondisi lingkungan administrasi. Pendekatan ekologi administrasi publik membantu menjelaskan mengapa kebijakan digital seragam sering menghasilkan dampak yang berbeda. Kebijakan transformasi birokrasi perlu menyesuaikan karakteristik lingkungan organisasi dan wilayah. Kesimpulan ini memperkuat pentingnya perumusan kebijakan publik digital yang sensitif terhadap dinamika ekologi administrasi publik Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi disampaikan kepada dosen pengampu dan lingkungan akademik yang telah memberikan ruang diskusi serta masukan kritis. Penulis juga berterima kasih kepada para peneliti dan akademisi yang karyanya menjadi rujukan penting dalam kajian ini. Dukungan moral dan akademik dari berbagai pihak sangat membantu kelancaran penulisan. Artikel ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsawan, I. W. E., Hadiansyah, A., Martini, I. A. O., Risnawati, S., Kawuryan, R., Juansa, A., ... & Parwita, G. B. S. (2025). *Green Human Resource Management (GHRM)*. Star Digital Publishing.
- Diah Hidayati, M. M. (2022). *Sistem Informasi Pendidikan dan Transformasi Digital*. UAD PRESS.
- Erison, Y., Surur, M., Ahmad Sholikin, E., Rohmah, N. L., Anas, F., Rosyid, H., ... & Sholikin, A. *Transformasi Pelayanan Publik dengan Artificial Intelligence (AI): Inovasi Teori dan Konsep Terbaru untuk Masa Depan*.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61, 61-62.
- H Fahmi Adam, S. E. (2025). *Kepemimpinan muda dalam dinamika politik dan pembangunan*. Greenbook Publisher.
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2025). INOVASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK: STRATEGI ADAPTASI TERHADAP DISRUPSI DIGITAL. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 296-305.
- Heri, H., Sandika, F., Apriliani, F., Ramadhan, G., & Adilah, H. (2021). Revolusi industri 5.0 dalam perspektif ekologi administrasi desa. *Neo Politea*, 2(1), 35-45.
- Ilyas, S., Nasution, K., Ginting, B., & Lubis, L. A. *TRANSFORMATION TOWARDS THE ULTIMATE*.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muntu, D. L. (2024). *LINGKUNGAN ORGANISASI KONTEMPORER*. Perilaku Organisasi Kontemporer, 10.
- Rustiyana, R., Estede, S., Asmara, A., Litaay, M. L., Haryono, H., Rianty, E., & Juansa, A. (2025). *Paradigma Baru Pendidikan Kontemporer: Teori, Isu, dan Relevansinya Pendidikan Abad 21*. Star Digital Publishing.
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., ... & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suryanto, A. (2023). *TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK MENJAWAB TANTANGAN ERA DISRUPSI: Gagasan Pembaharuan dan Praktik Kepemimpinan Prof.*

Dr. Adi Suryanto, S. Sos., M. Si., CHRM.
Utama, I. G. B. R. (2025). Antologi Krisis Multi Dimensi: Ancaman Nyata Runtuhnya Reputasi dan Masa Depan Pariwisata Bali. Deepublish.
Yahya, I., Surya, B., & Arief, R. (2025). Buku Ajar Administrasi dan Kelembagaan Perencanaan. CV Eureka Media Aksara.